BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kedudukan NFT (Non-Fungible Token) dalam hukum Indonesia, NFT memenuhi unsur sebagai benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata. Sebagai benda, NFT berstatus sebagai objek hukum yang sah untuk diperjanjikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1333 KUH Perdata. Karakteristik NFT yang tidak berwujud dan berbasis kreasi intelektual menjadikan NFT erat kaitannya dengan HKI, khususnya hak cipta. Relevansi NFT dengan hak cipta didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta yang penjelasannya selaras dengan karakteristik NFT sebagai suatu karya seni digital. Sebagai benda yang memiliki hak-hak kebendaan, NFT memenuhi kualifikasi objek gadai sesuai dengan Pasal 1153 KUH Perdata dan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Meskipun memenuhi syarat objektif 2 jenis jaminan kebendaan, NFT lebih sesuai dijamin melalui skema fidusia daripada gadai, karena sifat digitalnya menyulitkan penyerahan fisik sebagaimana disyaratkan dalam gadai. Fidusia memungkinkan debitur tetap menguasai NFT sehingga nilai ekonominya terjaga. Dengan karakteristik NFT yang tidak berwujud, bergerak, dapat dimiliki dan dialihkan, aset ini memenuhi kualifikasi objek fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 42 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memperkuat legitimasi NFT sebagai objek jaminan fidusia melalui penegasan bahwa NFT, sebagai perwujudan

hak cipta dalam ekosistem digital, dapat dijadikan jaminan melalui tiga skema, yaitu jaminan fidusia, kontrak ekonomi kreatif, dan hak tagih atas royalti. Ketiga skema ini pada akhirnya berujung pada pengakuan skema fidusia sebagai satu-satunya pendekatan hukum yang mampu mengakomodasi NFT dalam sistem pembiayaan formal. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas fidusia yang tidak mewajibkan perpindahan fisik atas objek jaminan serta kemampuannya untuk menyesuaikan dengan aset digital yang bersifat intangible. Meskipun secara yuridis NFT sah dijadikan jaminan fidusia, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pada aspek penilaian dan eksekusi. Penilaian NFT menuntut pendekatan yang tepat dan multidimensional, karena nilai NFT sangat fluktuatif dan tergantung pada kondisi pasar digital. Di sisi lain, mekanisme eksekusi NFT sebagai objek jaminan fidusia telah diakomodasi secara komprehensif dalam PP Ekraf dan UU Jaminan Fidusia. Dengan demikian meskipun skema jaminan fidusia dinilai paling rasional dan adaptif untuk mengakomodasi NFT sebagai aset jaminan, namun masih perlu ada sinkronisasi dan integrasi hukum serta teknologi dalam pelaksanaannya.

4.2 Saran

Melalui analisis yang telah dilakukan, meskipun KUH Perdata, undang-undang, serta peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 telah mengakomodasi keabsahan NFT sebagai objek jaminan, masih terdapat kekosongan hukum yang nyata terkait pengaturan teknis seperti pengakuan NFT sebagai aset kripto secara *de jure*, pendaftaran NFT sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, penilaian fluktuasi NFT, dan eksekusi NFT. Pengakuan NFT sebagai aset ekonomi kreatif dalam PP 24/2022 merupakan langkah awal yang penting, namun

belum cukup untuk menjamin kepastian hukum, sehingga berisiko menimbulkan ketidakjelasan bagi para pihak dan menghambat pemanfaatannya dalam pembiayaan berbasis aset digital.

Mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan kerangka hukum khusus yang secara sistematis mengatur seluruh aspek perjanjian dan jaminan atas NFT, termasuk di dalamnya mekanisme pembuktian kepemilikan digital, pengakuan transaksi berbasis *smart contract*, perlindungan hak kekayaan intelektual terkait NFT, serta tata cara eksekusi jaminan yang sesuai dengan karakteristik *blockchain*. Regulasi tersebut harus bersifat adaptif terhadap dinamika teknologi informasi, fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan model bisnis baru, dan mampu melindungi kepentingan hukum para pihak tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan serta kepastian hukum. Dengan membangun regulasi yang integratif dan progresif, hukum Indonesia dapat lebih optimal dalam mendorong NFT sebagai aset jaminan yang sah dan aman dalam sistem pembiayaan nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi perkembangan global di bidang aset digital dan ekonomi berbasis *blockchain*.